

**PERAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
Dr. R. SOSODORO DJATI KOESOEMO BOJONEGORO UNTUK
MENINGKATKAN DISIPLIN PNS**

AHMAD SUPRASTIYO
DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. Lettu Suyitno, No. 2, Kec. Bojonegoro

Abstrak

Pelayanan kesehatan sangat berperan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat terutama dalam bidang pengobatan dan pemulihan. Disamping itu pelayanan kesehatan juga diarahkan pada upaya preventif terhadap pelayanan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka upaya meningkatkan disiplin PNS dilingkungan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, direktur telah memberikan arahan dan himbauan kepada seluruh PNS di lingkungan kerjanya untuk senantiasa melaksanakan tugas-tugas dengan semangat disiplin yang tinggi. Adapun upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan rapat dinas yang dilaksanakan setiap bulan sekali, pemberian teguran kepada PNS yang lalai dalam disiplin waktu dan bentuk-bentuk pembinaan disiplin pegawai lainnya yang diberikan setiap hari pada acara apel pagi. Fokus penelitian ini adalah Kegiatan pembinaan rutin, Kegiatan bidang keteladanan, Kegiatan persuasi dan penerangan, Pelaksanaan Undang-undang Kedisiplinan, Tingkat kepatuhan pada jam kerja, Presensi kehadiran, Kondisi tata ruang kantor, Tanggung jawab yang diselesaikan, Sanksi yang diberikan, berdasarkan Undang-undang Kepegawian. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan analisa kualitatif. Simpulan hasil penelitian bahwa peran direktur dalam rumah sakit umum dalam meningkatkan disiplin PNS sudah cukup baik. Saran Pimpinan organisasi tidak perlu ragu-ragu dalam memberikan hukuman administratif kepada pegawai dan memberikan penghargaan pada yang berprestasi. Selain itu juga harus tegas memberikan penilaian yang obyektif pada kinerja PNS. Tindakan ini nantinya juga akan menjadi parameter bagi bawahan dalam melaksanakan tugas setiap harinya.

Kata Kunci: Peran, Disiplin, PNS

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan sangat berperan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat terutama dalam bidang pengobatan dan pemulihan. Disamping itu pelayanan kesehatan juga diarahkan pada upaya preventif terhadap pelayanan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pelayanan kesehatan yang optimal akan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat ke unit pelayanan kesehatan yang akan berdampak positif terhadap pengurangan angka kesakitan yang ada pada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang optimal dengan titik berat pada aspek sosialnya akan mampu meningkatkan derajat kesehatan baik kalangan ekonomi kuat, menengah maupun masyarakat kelas bawah.

RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro merupakan salah satu sarana kesehatan yang disediakan pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat, agar pelayanan kesehatan yang ada dapat lebih merata dan terjangkau. Namun perlu disadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum mampu memuaskan pihak-pihak yang dilayani, hal ini sering terungkap baik berupa keluhan dari masyarakat pengguna fasilitas kesehatan maupun sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja PNS di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dalam pelayanan kesehatan yang ada. Sorotan tersebut antara lain pada Pandangan Umum Fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap pembahasan Rancangan Pendapatan Asli Daerah maupun perubahan anggaran. Dari 5 Fraksi yang ada, di Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada tahun anggaran 2014, telah memberikan sorotan yang tajam tentang kinerja pelayanan kesehatan sejumlah tiga fraksi, dalam pembahasan RAPBD dan 4 fraksi dalam pembahasan perubahan APBD. Hal ini menunjukkan keseriusan anggota Dewan untuk menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro pada umumnya. Direktur RSUD Bojonegoro selaku

pimpinan suatu organisasi, telah melakukan banyak hal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang ada baik berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, peningkatan sarana dan prasarana, maupun peningkatan profesionalisme petugas pelayanan kesehatan terutama yang menyangkut predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam rangka upaya meningkatkan disiplin PNS dilingkungan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, direktur telah memberikan arahan dan himbauan kepada seluruh PNS di lingkungan kerjanya untuk senantiasa melaksanakan tugas-tugas dengan semangat disiplin yang tinggi. Adapun upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan rapat dinas yang dilaksanakan setiap bulan sekali, pemberian teguran kepada PNS yang lalai dalam disiplin waktu dan bentuk-bentuk pembinaan disiplin pegawai lainnya yang diberikan setiap hari pada acara apel pagi.

sehingga rumusan masalah yang harus dipecahkan ialah Bagaimanakah peran Direktur RSUD Bojonegoro dalam meningkatkan Disiplin PNS, tujuan penelitian untuk menjelaskan Peran Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro untuk meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), manfaat penelitian bagi Direktur RSUD Bojonegoro untuk meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus dalam penelitian ini adalah: Kegiatan pembinaan rutin, Kegiatan bidang keteladanan, Kegiatan persuasi dan penerangan, Pelaksanaan Undang-undang Kedisiplinan, Tingkat kepatuhan pada jam kerja, Presensi kehadiran, Kondisi tata ruang kantor, Tanggung jawab yang diselesaikan, Sanksi yang diberikan, berdasarkan Undang-undang Kepegawian. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 75 orang PNS. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu

menggunakan sampel bertujuan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni: Penelitian Keputusan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan melalui Wawancara dan observasi. Data Primer dan Sekunder yang telah dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan dengan jalan sebagai berikut : Pengkodean (Code), Penyeleksian (Editing), dan Tabulasi. Setelah itu, data siap untuk dianalisis guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Peran

Leonardo D. Massam dalam Bukunya Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang mengartikan peran sebagai pelaku sebagai tokoh dalam sandiwara dan sebagainya (Leonardo D. Massam, 1983:203). Sedangkan pengertian peran menurut Adam I. Indrajaya adalah Pola tugas dan kewajiban anggota kelompok serta tentang cara bagaimana suatu tugas dibagi-bagi antara anggota kelompok (Adam I. Indra Jaya, 2000:131). Menurut Thibaut dan Kelley, peran adalah suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang oleh orang-orang lain bila ia melakukan interaksi dengan mereka (Adam I. Indra Jaya, 2000:131). Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok/organisasi dari seseorang/pelaku.

Rumah Sakit Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro

Pada sekitar tahun 1905 Zending di Bojonegoro telah mendirikan Gereja Jawa bertempat di jalan Teuku Umar sekarang. Pada kurang lebih tahun 1924, Zending Bojonegoro mendirikan poliklinik yang tempatnya berdampingan dengan gereja Jawa tersebut. Pada waktu itu zending mengajukan ijin kepada Inspektur Kesehatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Jawa Timur untuk mendirikan rumah sakit di Bojonegoro. Permohonan tersebut ditolak oleh pemerintah kolonial

dan sebagai gantinya zending diberi kuasa untuk mengurus rumah miskin (*armenhuis*) milik pemerintah kolonial yang letaknya di tanah yang sekarang ini berdiri bangunan RSUD Bojonegoro.

Pada tahun 1928 Poliklinik zending yang terletak di jalan Teuku Umar dipindahkan ke lokasi rumah miskin tersebut. Sejak itu poliklinik berkembang menjadi rumah sakit karena para pasien yang berobat ada yang harus dirawat tinggal. Dan pada waktu itu dibangun bilik perawatan di bagian depan. Pada bulan Maret 1942 Jepang mulai masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. Semua pegawai rumah sakit diperintahkan untuk mengungsi ke luar Bojonegoro sedangkan gedung rumah sakit dijadikan markas oleh tentara Jepang. Bulan Juli 1942 rumah sakit mulai diaktifkan kembali oleh Jepang dan dinamakan Bojonegoro Ken Byein. Untuk mengaktifkan kembali Jepang memanggil pegawai-pegawai yang mengungsi untuk bekerja seperti biasanya. Bulan Desember 1949 tentara pendudukan Belanda memasuki kota Bojonegoro. Dalam masa itu rumah sakit Bojonegoro berada di bawah penguasaan Inspektur Van Gezendleighd Oost Java Soerabaia dan Ziekenin Richting DVG Te Bojonegoro (DVG : Diens Volks Gezendleight atau Dinas Kesehatan Rakyat). Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah pendudukan Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia maka pada tanggal 19 Desember 1949 rumah sakit secara resmi kembali ke pangkuan Pemerintah Republik Indonesia. Pada masa itu dibuat papan nama rumah sakit dengan sebutan Rumah Sakit Umum Bojonegoro. Pada tahun 1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro nomor 203 tahun 1990 tanggal 27 Juli 1990 ditetapkan nama Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo sebagai nama RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro berlokasi strategis di Jln Wahidin nomor 40 ditengah kota Bojonegoro yang mudah dijangkau dari berbagai arah baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum. Di Bojonegoro terdapat

beberapa Rumah sakit Swasta, namun demikian RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo masih menjadi rumah rujukan bagi masyarakat bagi masyarakat Bojonegoro. Sampai dengan sekarang RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro adalah rumah sakit tipe B Non Pendidikan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 330/Menkes/SK/V/2006 tanggal 11 Mei 2006. Sifat bisnis adalah sosio ekonomi atau not to profit dan lebih menekankan pada pelayanan sosial kepada masyarakat tidak mampu dan sekaligus sebagai pusat rujukan bagi rumah sakit di wilayah Bojonegoro.

Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro

Sesuai dengan Pasal 3 Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Direktur RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro mempunyai tugas pokok :

”melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.” (Kab. Bojonegoro, 2008:82).

Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktur RSUD Bojonegoro mempunyai fungsi : a) Penyelenggaraan pelayanan medis; b) Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; c) Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan; d) Penyelenggaraan pelayanan rujukan; e) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; f) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; g) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. (Kab. Bojonegoro, 2008:9).

Analisis dan Interpretasi Data

Kegiatan Pembinaan Rutin

Untuk tetap menumbuhkan dan menjaga tingkat kedisiplinan pegawai pegawai, hampir setiap pimpinan organisasi merasa selalu dituntut secara moral guna melakukan pembinaan secara rutin kepada para pegawainya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktur RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dalam pembinaan rutin melalui tiga jalur : Melalui staff meeting, Melalui Inspeksi ruangan dan kearsipan dan ,Melalui pemberian peringatan secara lisan. Melalui staff meeting suasananya bisa lebih informal sehingga kesan yang muncul dari bawahan tidak terikat dengan kondisi hirarkhi organisasi yang ketat dan kaku, hal ini dilakukan setiap bulan sekali jatuh pada minggu pertama. Sedangkan sasaran dari staff meeting adalah mendorong sekaligus mengajak evaluasi diri untuk bisa bekerja lebih produktif agar tetap bertanggung jawab dan disiplin diri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kegiatan pembinaan rutin melalui staff meeting yang dilakukan secara kontinyu dalam setiap bulannya, sudah selayaknya memperoleh penafsiran positif dan perlu tetap dipertahankan dimasa mendatang. Melalui Inspeksi harapannya pimpinan organisasi bisa mengetahui secara langsung atas situasi dan kondisi masing-masing tempat atau ruangan kerja pegawai, karena bagaimanapun juga tata ruang kerja yang rapi memiliki pengaruh untuk kenyamanan bekerja. Sebagai kritik untuk kegiatan inspeksi ini sebaiknya tidak harus terprogram, bahkan bisa dilakukan setiap waktu apabila memiliki waktu yang longgar. Dengan demikian akan ditemukan kondisi senyatanya, sehingga masing-masing bagian akan selalu siap setiap saat untuk memelihara kerapian ruangan kearsipan dan peralatan kerja. Namun usaha Direktur untuk mau memperhatikan kondisi kerja dan tata kearsipan masing-masing bagian sudah bisa ditafsirkan baik. Demikian halnya tindakan Direktur untuk memberikan peringatan kepada pegawai secara langsung, baik teguran lisan secara preventif adalah sangat baik utamanya

untuk membina dan menjaga tingkat kedisiplinan karyawan sekarang dan mendatang. Secara umum kegiatan pembinaan rutin melalui jalur staff meeting, inspeksi dan pemberian peringatan yang dilakukan Direktur RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro diinterpretasikan positif dan baik. Dan khusus untuk inspeksi akan lebih baik lagi jika dilakukan setiap saat bila ada waktu longgar.

Kegiatan Ketauladanan

Memberikan tauladan atau contoh memang merupakan salah satu langkah yang efektif untuk mempengaruhi perilaku bawahan. Bentuk contoh perilaku yang ditunjukkan oleh Direktur RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro melalui kepatuhan pada jam kerja, kepatuhan pemakaian seragam dinas dan kebiasaan untuk menghargai karyawan/bawahan. Terkecuali ada tugas-tugas dinas luar ke Kabupaten atau di luar kota yang terpaksa meninggalkan hari dinas, Direktur selalu datang tepat waktu pada jam 07.00 WIB. Kebiasaan ini diharapkan bisa dicontoh oleh bawahan di kantor. Demikian pula pada saat jam pulang kerja tepat waktu jam 16.00 WIB, namun semuanya bisa berubah jika memang ada acara dinas yang dilaksanakan di luar kantor. Contoh kedisiplinan melalui kepatuhan jam kerja tersebut merupakan tindakan terpuji dan bisa diteladani. Pemakaian seragam dinas bagi aparat pemerintah merupakan ciri khas yang mungkin membedakannya dengan pegawai negeri sipil di negara lain. Bahkan khususnya di Indonesia pemakaian seragam dinas menjadi ciri dari setiap departemen atau dinas, hal ini terlihat dari warna seragam berikut atributnya. Begitu kuatnya aturan tentang pemakaian seragam dinas. Keteladanan dalam berpakaian dinas Direktur selalu menggunakan secara tepat dengan atribut lengkap. Keteladanan dalam berpakaian dinas ini harapannya bisa dicontoh oleh pegawainya atau bawahannya. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang dinilai mampu menjalankan tugas-tugas kedinasan secara

efektif dan efisien memang bukan merupakan suatu keharusan. Jika hal ini dilakukan oleh Direktur semata-mata adalah bentuk pengakuan pimpinan atas kinerja bawahan, karena kenyataannya manusia kerja membutuhkan pengakuan dari pihak lain. Disamping itu melalui penghargaan kepada pegawai yang baik, diharapkan bisa memberikan motivasi kepada pegawai lain agar berbuat dan bertindak seperti pegawai yang memperoleh penghargaan, sepanjang penghargaan itu diberikan secara obyektif dan tulus tanpa dilatar belakangi oleh kepentingan yang bersifat subyektif. Dengan demikian bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan oleh Direktur RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro merupakan tindakan terpuji dalam rangka membangun kompetisi pegawai untuk berprestasi sebaik-baiknya demi kepentingan tugas-tugas kedinasan. Langkah-langkah ketauladanan yang dilakukan oleh Direktur RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro merupakan tindakan positif dan terpuji. Khususnya untuk kebiasaan untuk memberikan penghargaan kepada staf kalau bisa jangan terlalu berlebihan, karena akan membuat staf terlena dengan segala kebanggaannya.

Kegiatan Persuasi dan Penerangan

Penerangan merupakan langkah pemberian informasi kepada pihak lain dalam hal ini pegawai, tentang berita terbaru yang menyangkut tentang instruksi peraturan maupun beberapa keputusan penting yang harus dipahami oleh pegawai sekaligus ditindak lanjuti. Media yang digunakan secara sederhana bisa dalam bentuk pengumuman tertulis, jika kandungan beritanya bersifat umum, tetapi juga bisa melalui media rapat kerja. Dengan difungsikannya papan pengumuman pada Kantor Direktur RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang jadwal kegiatan pegawai akan memudahkan pegawai memperoleh informasi tentang beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi

penerangan ke dalam organisasi akan bisa berjalan dengan efektif. Adapun berita-berita yang menyangkut tentang hal yang bersifat khusus, media yang digunakan adalah melalui rapat kerja. Dalam rapat kerja ini sudah tentu ada agenda yang harus dipecahkan, atau pemberian instruksi-instruksi yang bersifat ke dalam karena menyangkut strategi organisasi. Dalam forum ini Direktur melaksanakan fungsi penerangan langsung ke dalam agar segala berita baik instruksi, pedoman, strategi bisa dijabarkan sehingga mudah dipahami oleh bawahan. Dari sudut penerangan kenyataannya Direktur bisa melaksanakan dengan baik, sehingga tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pegawai sedini mungkin sudah dimengerti oleh pegawai dilingkungannya.

Presensi Pegawai

Adapun alasannya jika ada pegawai absen memiliki implementasi yang kurang baik bagi organisasi. Mulai perlu pengalihan tugas sesaat, produktifitas kerja menjadi kurang, hasil yang dicapai optimal. Lebih fatal lagi jika jumlah pegawai yang absen di atas konsisi normal sama hanya dengan “embrio pemogokan”, oleh karena itu pimpinan organisasi selalu berusaha untuk menekan akan absensi pegawai dengan harapan tidak mengganggu aktifitas organisasi secara keseluruhan. Dalam tahun 2014 keadaan absensi pegawai RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 2 (dua) kriteria yaitu : 30 (tiga puluh) pegawai absen dan ada keterangan yang jelas. 4 (empat) pegawai absen dengan tidak ada keterangan secara jelas (tanpa keterangan).

Dengan masih adanya pegawai yang tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas ini merupakan kondisi yang memprihatinkan. Pertama pegawai itu sendiri menunjukkan sikap yang kurang disiplin, yang kedua pegawai yang bersangkutan tidak menghargai kewenangan pimpinan organisasi dan yang ketiga siapa yang bertanggung jawab atas pengalihan tugas yang sehausnya dikerjakan pada hari itu. Selama tahun 2014 dalam setiap bulannya total karyawan yang absensi tidak lebih dari 10 % dari jumlah

karyawan, dan khususnya yang absen tanpa ijin 10 % dari dalam satu tahun dari jumlah karyawan . Kondisi ini tetap harus disikapi secara serius dalam usaha untuk meningkatkan disiplin pegawai, karena jika dibiarkan akan menjadi penyakit yang menular. Mengingat masih adanya pegawai yang absen tanpa ijin ini memberikan interpretasi bahwa tingkat kedisiplinan dalam bidang absensi pegawai dalam kriteria sedang, sudah barang tentu perlu lebih tegas lagi bahwa pegawai harus ijin jika tidak masuk kerja.

Frekuensi pelanggaran disiplin

Secara psikologis ada suatu delematis pada jiwa manusia bahwa jika tidak ada aturan cenderung menuntut dibuatkan peraturan, tetapi ada peraturan cenderung mencari titik kelemahan peraturan. Kecenderungan ini membawa anggapan wajar bila seorang pegawai melakukan pelanggaran disiplin kerja sekalipun sudah ada aturan yang mengatur disiplin kerja pegawai negeri sipil. Dari anggapan wajar ini jika dibiarkan akan membawa implikasi buruk bagi organisasi dalam bentuk meningkatkan frekuensi pelanggaran disiplin kerja pegawai.

Dalam tahun 2014, jika diinterpretasikan memang jumlah pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro tidak lebih dari 10 % dari jumlah pegawai. Kondisi ini masih bisa ditafsirkan baik, sekalipun tetap perlu memperoleh perhatian agar tidak terjadi penularan atau peningkatan diwaktu mendatang.

Sanksi yang dikeluarkan

Setiap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin sudah selayaknya memperoleh sanksi disiplin sesuai dengan bobot kesalahannya. Dengan klasifikasi jika bobot sanksinya ringan kewenangan pembinaan ada dalam wewenang pimpinan atasan langsung, jika sanksinya menjadi wewenang bagian kepegawaian dan jika sanksinya berat menjadi wewenang Bupati untuk mengeluarkan keputusan.

Dalam tahun 2014, sanksi yang pernah diterima oleh pegawai di lingkungan Kantor Direktur RS Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro adalah dalam klasifikasi ringan yaitu dalam bentuk teguran lisan yang langsung disampaikan oleh Direktur. Kondisi ini masih bisa diinterprestasikan baik, sekalipun perlu diperbaiki lagi diwaktu yang akan datang.

SIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : a) pembinaan rutin, terdiri atas pelaksanaan Staff Meeting, melakukan inspeksi ruangan dan arsip dan memberikan peringatan kepada staf yang melanggar disiplin. b) Memberi ketauladanan, terdiri atas contoh kehadiran pimpinan tepat waktu, pemakaian seragam dinas secara tepat dan memberikan penghargaan kepada PNS yang disiplin. c) Memberikan penerangan, melalui penyampaian informasi di papan pengumuman dan rapat kerja. d) Tingkat kedisiplinan PNS di lingkungan Kantor Direktur RSU Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro yaitu : Pegawai RSU Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memiliki tingkat kedisiplinan yang sedang hubungannya dengan jam kerja. e) Angka absensi PNS di RSU Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro bisa ditekan lebih kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro*, Bagian Organisasi, Bojonegoro, 2010.
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, *Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro*, Bagian Organisasi, Bojonegoro, 2012.
Daryanto, SS, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1985.

Lance Castle, DR , *Birokrasi Kepemimpinan dan Revolusi Sosial di Indonesia*, Hapsara, Jakarta 1983.

Leonardo Massam, dkk, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusda Karya, Bandung, 2002.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, *Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 Kabupaten Bojonegoro, Bagian Keuangan, Bojonegoro, 2007.*

Copyright: E-Jurnal Unigoro